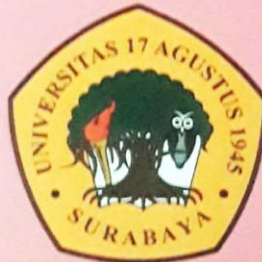


**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEADAAN DARURAT**

SKRIPSI



Oleh :

**LGDE SANDY SATRIA
NBI : 1311700120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN
DARURAT**

SKRIPSI



Oleh :

I Gde Sandy Satria

NBI : 1311700120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2020**

**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN
DARURAT**

SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH
I Gde Sandy Satria
NIM : 1311700120

Dosen Pembimbing



Dr Hufron, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEADAAN DARURAT**

OLEH:

I Gde Sandy Satria

NIM : 1311700120

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 022/ST/FH/I/2021

Tanggal : 18 Januari 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310870119

Sekretaris : Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310900210

Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310130613

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gde Sandy Satria
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT

Benar bebas dari Plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 januari 2021
Yang membuat pernyataan,


T Gde Sandy Satria

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gde Sandy Satria
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT

Benar bebas dari Publikasi Ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 januari 2021
Yang membuat pernyataan,


6000
I Gde Sandy Satria

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gde Sandy Satria
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan “skripsi” yang saya buat dengan judul :

**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN
DARURAT**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh SARJANA dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 27 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : I Gde Sandy Satria

Nomer Mahasiswa : 1311700120

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Karya Ilmiah saya yang berjudul :

**PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM KEADAAN
DARURAT**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 januari 2021
Yang membuat pernyataan,


BETTERAI
EMPEL
AACBAAHF948847522
6000
EMAS SURABAYA
I Gde Sandy Satria

KATA PENGANTAR

Astungkara Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap Om Awighnam astu namo sidham saya sangat bersyukur atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta I Nyoman Lestawi dan ibunda tersayang Ni Wayan Sekartini yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH., MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Hufron,SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan banyak solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dr. Sofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen MPH yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi-materi serta diskusi-diskusi selama dalam masa perkuliahan dan pra-skripsi saya.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas saya sejak awal di Angkatan 2017 rekan-rekan mas poernomo sekalian,dan teman-teman keluarga Fakultas Hukum yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

10. Seluruh staf bidang atau mungkin sudah dianggap keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menjadi bagian hangat dari perjalanan saya selama berkuliah.
11. Seluruh Organisasi yang pernah saya alami yaitu BEM FH, DAY FH, KPS, Aliansi Bem se-Surabaya, GMNI, KMHDI, dll., trimakasih selama ini telah menjadi wadah pembelajaran saya.
12. Teman-teman lainnya, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Surabaya, Desember 2020
Penulis

(I Gde Sandy Satria)

Abstract

Perkembangan jaman menuntut kesiapan dalam tantangan, Indonesia adalah negara hukum sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Maka tindakan pemerintahan yang telah terukur dalam konsep negara hukum harus juga tanggap terhadap dinamisnya perkembangan, dalam hal keadaan yang mendesak ataupun darurat diharapkan pemerintah yang nantinya akan memberikan solusi atas isu terkini, kesiapan ini pun lebih dituntut pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk mengetahui apa produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah di dalam keadaan darurat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Isu hukum yang sedang diajukan adalah : Apa Produk Hukum Pemerintah daerah dalam keadaan darurat dan Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat atas dikeluarkan produk hukum daerah dalam keadaan darurat yang merugikan masyarakat

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Produk Hukum Pemerintah daerah yang dapat dibuat pada saat kondisi darurat adalah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mengatasi dan menanggulangi keadaan darurat.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang dirugikan akibat dikeluarkan Peraturan Kepala Daerah tersebut adalah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha apabila Keputusan Kepala Daerah yang dikeluarkan bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Keyword : Produk Hukum, Keadaan darurat, Upaya Hukum.

Abstract

The development of the era demands readiness for challenges, Indonesia is a constitutional state in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which shows that in the overall administration of the Indonesian government it is obligatory to act based on the law. So government actions that have been measured in the rule of law concept must also be responsive to dynamic developments, in case of urgent or emergency situations it is hoped that the government will provide solutions to current issues, this readiness is even more demanded by the government closest to the community, namely the local government. The purpose of preparing this thesis is to find out what legal products can be made by local governments in an emergency.

This research is legal research, a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The legal issues that are being proposed are: What are the legal products of the local government in an emergency and what legal measures can be taken by the community to issue regional legal products in an emergency situatio.

The problem approach used to address these legal issues is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. The conceptual approach (conceptual approach) is used to study and analyze the framework, conceptual framework or theoretical basis of the legal issue to be studied, from this approach the researcher can use an analysis knife in finding answers to legal issues from the writing of this thesis.

Based on the analysis of legal materials carried out, it is concluded that regional government legal products that can be made during an emergency are Regional Head Regulations or Joint

Regional Head Regulations or Regional Head Decrees in the context of overcoming and overcoming an emergency.

Legal remedies that can be taken by members of the community who are disadvantaged as a result of the issuance of the Regional Head Regulation is to file a judicial review to the Supreme Court, on the grounds that it is contrary to a higher regulation and file a lawsuit to the Administrative Court if the Regional Head Decree issued contradicts the laws invitation and General Principles of Good Governance (AUPB).

Keyword: Legal Products, Emergency, Legal Remedies.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.8
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	2Error! Bookmark not defined.
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	2Error! Bookmark not defined.
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.	5
2.1 Konsep Keadaan Darurat	Error! Bookmark not defined.	
2.2 Konsep Otonomi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.	7
2.2.1 Pengertian Desentralisasi	Error! Bookmark not defined.	7
2.2.2 Bentuk Kewenangan Otonomi Daerah	Error! Bookmark not defined.	
2.3 Konsep Produk Hukum Dearah.....	Error! Bookmark not defined.	
2.3.1 Pengertian Produk Hukum daerah		30
2.3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum		33
2.3.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Membuat Peraturan Kebijakan (<i>Beleid Regel</i>)		34
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.	
3.1 Produk Hukum Daerah Yang Dikeluarkan Dalam Keadaan Darurat .	Error! Bookmark not defined.	
3.1.1 Penetapan Keadaan Darurat	Error! Bookmark not defined.	
3.1.2 Bentuk dan Kewenangan Pemerintah		42
3.1.3 Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah		52
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat ditempuh Masyarakat Akibat Dikeluarkan Produk Hukum Daerah dalam Keadaan Darurat yang Merugikan Masyarakat.....		71
3.2.1 Mengajukan Uji Materil Ke MARI.....		71
3.2.2 Mengajukan Gugatan ke PTUN.....		84
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.	6
4.1 Kesimpulan		96
4.2 Saran		96
Daftar Putaka	Error! Bookmark not defined.	

